



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **IMAM SAFRUDIN, S.Sos**
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Dra. YUNI RAHAYU, M.Si**
Jabatan : CAMAT PURBALINGGA
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

Dra. YUNI RAHAYU, M.Si
NIP. 19680118 198803 2 001

Pihak Pertama,

IMAM SAFRUDIN, S.Sos
NIP. 19680118 198802 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit Kerja : Kasi Pemerintahan dan Ketertiban Umum

No	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan dan atau Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Meningkatnya pelayanan publik kecamatan		Nilai evaluasi pelayanan publik	Nilai	93
		Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Persen	100
		- Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan jenis pelayanan yang dilaksanakan	Persen	100
		- Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	5
	Meningkatnya desa yang melaksanakan tertib administrasi		cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	Persen	100
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	cakupan desa yang dibina oleh kecamatan	Persen	100
		- Terfasilitasinya administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	2
		- Terfasilitasinya pelaksanaan pemilihan kepala desa (yg ada pilkades)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala	Dokumen	2

			Desa		
	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah laporan penanganan kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Laporan	12
		Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Kegiatan	12
		- Terselenggaranya sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, tantara nasional indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, tantara nasional indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan	laporan	12
	Meningkatnya penanganan potensi konflik di wilayah Kecamatan		Persentase potensi konflik yang tertangani	Persen	100
		Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan bulanan potensi konflik	Laporan	12
		- Terlaksananya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Orang	50

No	Program, Kegiatan dan atau Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 43.712.000,-	APBD
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 41.472.000,-	APBD
	- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 41.472.000,-	APBD
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp. 2.240.000,-	APBD
	- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Rp. 2.240.000,-	APBD
2.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 2.000.000,-	APBD
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Rp. 2.000.000,-	APBD

	Pengawasan Pemerintahan Desa		
	- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp. 1.000.000,-	APBD
	- Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Rp. 1.000.000,-	APBD
3.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	
	- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp. 23.500.000,-	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 29.185.000,-	APBD
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 29.185.000,-	APBD
	- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Rp. 29.185.000,-	APBD

Pihak Kedua,



Dra. YUNIRAHAYU, M.Si
NIP. 19600601 198803 2 001

Purbalingga, 02 Januari 2025
Pihak Pertama,



IMAM SAFRUDIN, S.Sos
NIP. 19680118 1988 1 001